

AKUNTABILITAS TATA KELOLA DAN *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS* (SDGS) TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Kharisma Nurul Fadhillah¹, Tulus Suryanto², Ahmad Hazas Syarif³

^{1,2,3}UIN Raden Intan Lampung

Email: nurul.kharisma122@gmail.com¹, tulus@radenintan.ac.id², hazassyarif@radenintan.ac.id³

Abstract

The purpose of this research is to investigate responsibility in the management of village funds from an Islamic viewpoint., covering the phases of preparation and execution, administrative record-keeping, and answerability reporting. This analysis aims to utilizes a qualitative descriptive approach approach using a case study method conducted in Sinar Rejeki Village, Jati Agung District, South Lampung Regency. The results suggest that the duty of overseeing village financial resources in Sinar Rejeki Village aligns with the regulations According to the Regulation of the Minister of Home Affairs No. 114 of 2014 and adheres to applicable Sharia principles. Therefore, based on egulation No 113 of 2014 from the Minister of Home Affairs, the Management of village funds planning in Sinar Rejeki Village is considered transparent and promotes active community participation.

Keywords: *Governance, Transparency, Accountability.*

Abstrak

Tujuan dari temuan ini adalah menganalisis akuntabilitas dalam regulasi pengelolaan anggaran desa bersumber perspektif Islam, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan administrasi, serta akuntabilitas. Pendekatan temuan ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang diterapkan di Desa Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Temuan ini mengindikasikan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sinar Rejeki telah sejalan selaras dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014, dan telah sesuai dengan kaidah syariah yang berlaku. Dengan demikian, mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014, mekanisme perancangan anggaran desa di Desa Sinar Rejeki telah memenuhi aspek transparansi dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat.

Kata Kunci: Tata Kelola, Transparansi, Akuntabilitas.

PENDAHULUAN

Pembangunan desa menjadi perhatian utama pemerintah adalah bagian penting dari strategi nasional untuk Memperbaiki taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (Subekan,

2020). Kondisi ini berakar dari oleh fakta bahwa pertumbuhan besar wilayah Indonesia adalah perdesaan, Menurut Informasi (Badan Pusat Statistik, 2024) didapati 83.971 desa Di Indonesia. Sehingga pendekatan yang terfokus dan terarah dapat memberikan dampak signifikan dalam pengembangan sosial dan ekonomi. Dengan desa sebagai langkah awal menuju kemandirian, alokasi dana desa harus dikelola dengan cermat dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugas ini, diperlukan pemerintah desa yang memiliki keterampilan yang cukup dan disertai dengan fasilitas serta infrastruktur yang mencukupi (Syamsuri, 2024). Dengan perhatian dan manajemen yang tepat, desa tidak hanya akan menjadi mandiri, tetapi juga dapat berperan sebagai pendorong utama pertumbuhan nasional (Asrori, 2014).¹

Manajemen dana desa secara berkelanjutan menjadi perhatian global, seiring upaya berbagai negara dalam memperkuat pembangunan di wilayah pedesaan serta mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.² Anggaran desa disalurkan secara adil ke seluruh wilayah kabupaten. Pembagiannya terdiri dari Alokasi Dasar (AD) yang dihitung dengan membagi alokasi dasar per kabupaten dengan jumlah desa. Selanjutnya, Alokasi Formula disusun berdasarkan data dari pemerintah terkait, Jumlah populasi, persentase kemiskinan, luas cakupan wilayah, dan tingkat kesulitan geografis. (Indika et al., 2022).³

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Temuan dilakukan di Desa Sinar Rejeki, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dengan durasi sekitar \pm 2 bulan sejak diterbitkannya surat izin penelitian oleh institusi terkait.

Metode Penelitian

¹ Al Hazmi, R. A., A'yun, Q., Firdaus, I. N., Wardaningrum, L., Permana, A., Setiawan, A. G. D., ... & Rahmaningrum, W. R. A. (2024). Analisis faktor keberhasilan pengelola dana desa di Desa Cirumpak. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(6), 1183-1194.

² Liani, Y., & Takari, D. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 4810-4825.

³ Anisa, B. M. N., Noor, I., & Nugroho, G. W. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jampangkulon. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1665-1687.

Temuan ini menerapkan pendekatan analisis deskriptif. Sebagaimana dijelaskan oleh Suharsimi Arikunto (2003), penelitian deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan suatu variabel, fenomena, atau kondisi tanpa menguji hipotesis tertentu, melainkan hanya menyajikan data secara faktual. Pendekatan yang diterapkan dalam temuan ini bersifat kualitatif. Tempat penelitian berada di Kecamatan Jati Agung dengan fokus pada Desa Sinar Rejeki dikarenakan dana desa yang turun hampir seluruhnya terealisasi ini terbilang paling besar diantara desa lain yang ada di Kecamatan Jati Agung. Subjek dalam temuan ini mencakup pemerintah serta aparatur desa yang berada di area penelitian, termasuk masyarakat dan kepala desa. Dalam pendekatan ini, peneliti mengidentifikasi sumber informasi yang valid dengan meminta rekomendasi dari informan lain yang dipandang dapat menyajikan informasi relevan bagi temuan ini. Sementara itu, metode akuisisi informasi dilakukan melalui observasi langsung, di mana peneliti secara langsung melakukan kunjungan lokasi penelitian untuk memperhatikan keterlibatan penduduk di area tersebut.

Teknik Pengumpulan Data

Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis data adalah pendekatan kualitatif, di mana data dijelaskan, diuraikan, serta dianalisis menurut temuan melalui wawancara serta observasi langsung di lokasi. Informasi diperoleh peneliti diorganisir, disunting, disempurnakan, lalu diketik kembali, mengingat mayoritas informasi yang diperoleh belum dalam kondisi yang sudah diproses (seperti laporan lapangan yang masih dipenuhi dengan tulisan tangan dan sukar dipahami oleh orang lain, catatan audio yang belum ditranskrip, beserta gambar-gambar yang belum diprint atau digolongkan). Informasi kualitatif yang cukup besar perlu disederhanakan dan diklasifikasikan pada kelompok yang sesuai. Selain itu, dalam analisis data kualitatif, peneliti juga menghubungkan temuan empiris berdasarkan teori yang sudah ada, kemudian menafsirkan temuan tersebut sesuai dengan perspektif akademik yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Akuntabilitas Tata Kelola

Pentingnya Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam pengelolaan yang berperan krusial dalam memperkuat kepercayaan publik terhadap berbagai inisiatif atau

kebijakan yang disusun serta diimplementasikan oleh pemerintah demi kepentingan jangka panjang. (Donaldson 1998) mendefinisikan tata kelola sebagai sistem yang menjadi dasar pertanggungjawaban organisasi Untuk mempertahankan standar perawatan yang optimal dan meningkatkan mutu layanan secara berkelanjutan, mereka menciptakan ekosistem yang mendorong keunggulan.⁴ Akuntabilitas mencakup konsep yang luas, termasuk kewajiban untuk bertanggung jawab, menyajikan, melaporkan, serta mengungkapkan seluruh aktivitas agen kepada masyarakat (Mardiasmo, 2009).⁵ Pemanfaatan platform berbasis internet sebagai alat transparansi dan tanggung jawab publik terkait anggaran desa berperan dalam menyediakan data penting untuk penduduk desa, sehingga dapat mendorong keterlibatan mereka secara lebih aktif.⁶

Sebelum melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), tahap awal yang dilakukan adalah menyelenggarakan Musyawarah Dusun (Musdus), kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Khusus (Mushus). Setelah proses Musdus dan Mushus selesai, barulah Musyawarah Desa (Musdes) dapat dilaksanakan. Aparat Desa akan mengadakan musyawarah akhir yang dikenal sebagai Musrenbangdes, di mana Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai pemimpin jalannya musyawarah ini. BPD sendiri bertindak sebagai perwakilan masyarakat dalam perumusan keputusan. Oleh karena itu, BPD memiliki wewenang dalam mengatur jalannya Musrenbangdes guna menentukan perencanaan untuk periode berikutnya." (Hasil wawancara pada 30 Desember 2024) ⁷

Merujuk pada keterangan informan sebelumnya, dapat disimpulkan manajemen anggaran untuk Alokasi Desa sesuai dengan ketetapan Kepala Daerah Lampung Selatan Nomor 4.A Tahun 2020 mengenai distribusi sumber daya serta Pembagian Rincian Alokasi Dana Desa bagi seluruh desa di Kabupaten Lampung Selatan pada periode 2020 yang banyak pihak yang mengusulkan dalam proses perancangan.

⁴ Flynn, Maureen Alice, and Niamh M Brennan, 'Mapping Clinical Governance to Practitioner Roles and Responsibilities', 35.9 (2021), 18–33

⁵ Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334-344.

⁶ Arianto, B. (2023). Tata Kelola Media Sosial Bagi Penguatan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Surianeun, Kabupaten Pandeglang. *Rahmatan Lil'Alamin Journal of Community Services*, 30-38.

⁷ Mais, R. G., Nuryati, T., Sakti, S. H., & Lestari, L. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 4(2), 140-158.

Tata Kelola Menurut Perspektif Islam

Pengelolaan negara pada era Rasulullah menitikberatkan pada penguatan kapasitas Potensi manusia, diawali dengan pembentukan Persaudaraan Islam antara kaum Muhajirin dan Anshar. Mengingat masyarakat Madinah memiliki keberagaman yang tinggi, maka lahirlah Prinsip dasar Piagam Madinah sebagai dasar pijakan bersama (*kalimah sawa*) yang disepakati oleh berbagai kelompok di Madinah guna mewujudkan tatanan masyarakat politik yang inklusif. Penulis mengungkapkan beberapa kesenjangan dalam syariah praktik tata kelola, terutama dalam pelaporan, pengungkapan dan penyelesaian fatwa.⁸ Tata kelola merupakan salah satu mekanisme utama untuk mengendalikan dan menyeimbangkan masalah yang mungkin terjadi dalam organisasi.⁹ Administrasi pemerintahan dalam konteks syariah juga mencakup pengaturan interaksi antarindividu, yang meliputi aspek muamalah dan ‘uqubah. Dalam aspek muamalah, cakupannya mencakup tata kelola pemerintahan, sistem perekonomian, struktur pendidikan, interaksi antara laki-laki dan perempuan, serta hubungan diplomasi. Sementara itu, aspek ‘uqubah (sistem sanksi) meliputi hudud (misalnya, hukuman rajam), jinayah (penerapan qishash), ta’zir (hukuman bagi pelanggaran syara’ yang tidak memiliki ketetapan eksplisit pada nash), serta mukhalafat (hukuman atas pelanggaran regulasi administrasi negara) (An-Nabhani 1994: 169-211).¹⁰

Tujuan SDGs Terkait Ekonomi

Sustainable Development Goals atau disebut dengan SDGs merupakan suatu program mendunia jangka panjang guna meningkatkan sumber daya serta potensi yang ada pada setiap negara. *Sustainable Development Goals* (SDGs) Secara resmi pada 25 September 2015, produk ini diperkenalkan pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terletak di New York (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018).¹¹ Indonesia adalah salah satu negara yang berkontribusi

⁸ Rejeb, Abderahman, and Karim Rejeb, ‘Tracing Knowledge Di Ff Usion Fl Ows in Islamic Fi Nance Research: A Main Path Analysis’, 2024

⁹ Kumkit, Tidarat, Christopher Gan, and Baiding Hu, ‘Members’ Perspectives of Good Governance Practice of Thailand’s Credit Union Cooperatives’, 31.1 (2024), 55–73

¹⁰ Khalil, M. M. Z. F. (2021). Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah Analisis Penerapan Syariat Islam, Aceh–Indonesia.

¹¹ Kohl, Katrin, Charles Hopkins, Matthias Barth, Gerd Michelsen, Leuphana Universität Lüneburg, Jana Dlouh, and others, ‘A Whole-Institution Approach towards Sustainability: A Crucial Aspect of Higher Education’s Individual and Collective Engagement with the SDGs and beyond’, 2021

secara aktif dalam menetapkan target SDGs di tingkat nasional.¹² Pemerintah secara konsisten berupaya mengentaskan kemiskinan melalui berbagai inisiatif, salah satunya diwujudkan dalam bentuk dana desa.¹³ Sesuai Sehubungan dengan itu, Kementerian Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berupaya mewujudkan insfrakstruktur terintegrasi di tingkat desa melalui *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.¹⁴

Penerapan SDGs di Tingkat Desa

Kemiskinan tetap menjadi isu sosial yang berulang dan merupakan permasalahan utama yang memerlukan penanganan segera.¹⁵ Jumlah penerima bantuan bagi masyarakat miskin di Desa Sinar Rejeki mengalami penurunan dari tahun 2022 hingga 2024, sebagaimana terlihat dari lebih tingginya angka penerima pada tahun 2022 melihat perbandingan terhadap tahun 2024.

Tabel 4. Total Penerima Alokasi Bantuan dari Pemerintah pada Tahun 2022-2024

No.	Total Penerima Subsidi Pemerintah	periode	Nama Bantuan	Jumlah Bantuan
1.	131 KK	2022	BLT DD	Rp. 900.000 (Oktober-Desember)
2.	39 KK	2023	BLT DD	Rp. 900.000 (Agustus-Oktober)
3.	27 KK	2024	BLT DD	Rp. 600.000 (Juni-Juli)

Sumber: Sistem Informasi Desa

¹² Tasia, E., & Martiningsih, R. S. P. (2023). Implementasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* Desa (Studi Kasus: BUMDes Bahtera Mandiri Di Desa Jenggala, KLU). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 105-117.

¹³ Normasyhuri, K., Suryanto, T., & Prayoga, R. (2022). Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dengan Pendekatan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs): Tinjauan Ekonomi Islam. *RELASI: JURNAL EKONOMI*, 18(2), 173-185.

¹⁴ Wibowo, M. I. S., & Hapsari, A. N. S. (2022). Pengelolaan keuangan BUMDes: upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(1), 52-71.

¹⁵ Nawir, A., Syamsuddin, S., & Jusniaty, J. (2022). Penerapan Program *Sustainable Development Goals* (SDGs) Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Demokrasi*, 2(1), 1-18.

Kepala Desa Sinar Rejeki, Iwan Syamsuri, menegaskan bahwa penyaluran pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT-DD) wajib dilakukan secara penuh tanpa adanya pengurangan dalam kondisi apa pun. "Kami menyalurkan BLT-DD kepada 27 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk dua bulan, yakni Juni dan Juli," jelas Iwan. Ia menambahkan bahwa setiap KPM memperoleh bantuan nominalnya adalah Rp 300.000 setiap bulan, atau total mencapai Rp 600.000 untuk periode dua bulan dalam Tahun Anggaran 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Desa Sinar Rejeki, Iwan Syamsuri, dalam kegiatan penyerahan bantuan pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, bertempat di Kantor Desa Sinar Rejeki. Iwan juga berharap agar penduduk yang menerima kegunaan dari BLT-DD dapat menggunakannya secara optimal untuk memenuhi kebutuhan esensial, seperti membeli bahan pangan pokok dan kebutuhan sehari-hari lainnya sesuai dengan keperluan masing-masing.

"Mudah-mudahan pembagian BLT-DD ini bermanfaat bagi masyarakat yang mendapatkan, minimal bisa membantu meringankan beban mereka di kondisi sekarang ini," tandasnya.

Sustainable Development Goals (SDGs) Menurut Perspektif Islam

Konsep fundamental dalam pembangunan ekonomi berdasarkan ajaran Islam menyatakan bahwa Tuhan menyusun sumber daya alam sebagai sarana atau modal bagi insan guna meraih kesejahteraan, yang biasa disebut dengan nama *falah*.¹⁶ *Sustainable development goals (SDGs)* Pemerintah dalam Islam perlu mempertimbangkan lima metode pemenuhan kebutuhan mendasar manusia yang wajib dipenuhi:

1. Perlindungan terhadap agama (Al-Din)
2. Pemeliharaan kehidupan (Al-Nafs)
3. Pelestarian akal (Al-Aql)
4. Perawatan keturunan (Al-Nasl)
5. Pengamanan harta (Al-Maal)

¹⁶ Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. (2020). Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (sustainable development goals) dalam perspektif islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131-154.

Islam telah menetapkan mutu kehidupan orang yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Jika rancangan ini diterapkan pada struktur pemerintahan, keuntungan yang diperoleh tidak terbatas hanya pada kalangan umat Islam, namun oleh masyarakat yang beragam (Amalia, 2016).¹⁷ *Sustainable development goals* dalam pandangan Islam, diyakini bahwa manusia merupakan motor penggerak di balik tujuan pembangunan berkelanjutan, sementara etika menjadi aspek fundamental yang melandasinya.

B. Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Beragam regulasi serta ketentuan, termasuk sanksi yang diberlakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, kerap menjadi hambatan, terutama terkait kompetensi Tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan anggaran desa. Pada konteks ini, aturan serta tuntutan administratif dalam pemanfaatan Alokasi Dana Desa (ADD) berakibat menciptakan kecemasan bagi Desa Sinar Rejeki pada pengelolaannya.¹⁸ Pemanfaatan anggaran desa salah satunya parameter pertumbuhan ekonomi untuk proses infrastruktur desa.¹⁹ Berikut ini adalah jumlah Alokasi Dana Desa Sinar Rejeki.

Tabel 5. Jumlah Alokasi Dana Desa Sinar Rejeki

Tahun	ADD
2024	Rp. 1.331.441.000
2025	Rp. 1.582.396.000

Sumber: Sistem Informasi Desa

Merujuk pada tabel sebelumnya, dapat disarikan bahwa distribusi dana desa untuk Sinar Rejeki mengalami peningkatan, di mana pemerintah lebih memfokuskan penyaluran dana ke

¹⁷ Sulasih, L. I., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Analisis Kesadaran Industri Fashion dalam Upaya Meningkatkan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Produksi dan Konsumsi *Sustainable Fashion* Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Youth & Islamic Economic Journal*, 3(02), 1-18.

¹⁸ Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1).

¹⁹ Permata, N. I., & Fauzan, A. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA MASARAN BANYUATES TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Islamic Economics And Finance Journal*, 1(2), 90-100.

desa dengan populasi warga miskin dan tertinggal dibandingkan dengan desa yang mayoritas penduduknya berasal dari golongan ekonomi menengah ke atas.²⁰

Peran Dana Desa Dalam Pembangunan Ekonomi

Hasil wawancara dengan sejumlah warga Desa Sinar Rejeki mengungkapkan Desa telah melaksanakan inisiatif pembangunan infrastruktur yang menunjukkan hasil dari diskusi antara desa yang selanjutnya disampaikan pihak otoritas desa untuk dijadikan bagian dari rencana pembangunan pedesaan.²¹ Dalam cakupan yang lebih luas, pembangunan memiliki beragam definisi yang bergantung pada perspektif yang berbeda-beda.²²

Pertumbuhan Ekonomi Menurut Perspektif Islam

Menurut teori yang dikemukakan Menurut Adam Smith dan David Ricardo, ada empat elemen kunci yang memengaruhi perkembangan ekonomi, yaitu jumlah penduduk, akumulasi modal, luas wilayah. beserta sumber daya alam, serta tingkat kemajuan teknologi yang diterapkan.²³ Teori keberlangsungan, seperti teori sebelumnya, juga Konsep ini pertama kali dikenalkan dalam ranah ekonomi. Beberapa peneliti awal yang mengusung ide terkait pemikiran evolusioner dan seleksi alam dalam ekonomi mencakup Schumpeter (1934), Alchian (1950), Harrod (1939), serta Marshall (1949).²⁴

Menurut Islam, pertumbuhan ekonomi merujuk pada tren yang terus-menerus berlangsung, yang muncul dari faktor-faktor produksi utama dan mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia.²⁵

C. Pengelolaan Dana Desa

Proses Pengelolaan Dana Desa

²⁰ Aassouli, Dalal, 'Can UGITs Promote Liquidity Management and Sustainable Development?', 10.2 (2018), 126-42

²¹ Welan, V. P. R., Kawung, G. M., & Tumangkeng, S. Y. (2019). Peran dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Ranowanko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04).

²² Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *PERSPEKTIF*, 10(2), 371-382.

²³ Zainuddin, M. (2017). Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar*, 1(2).

²⁴ Jafar, H., Muda, I., Zainal, A., & Yasin, W. (2010). *Profit maximization theory, survival-based theory and contingency theory: a review on several underlying research theories of corporate turnaround*. *Jurnal Ekonom*, 13(4), 136-143.

²⁵ Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 63-71.

Sebagian pendapatan desa berakar pada alokasi anggaran redistribusi keuangan antara Anggaran yang diterima oleh kabupaten atau kota dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang distribusinya kepada masing-masing diberikan secara proporsional dengan alokasi minimal 10%, yang dikenal sebagai alokasi dana desa.²⁶

Tabel 6. APBDes Desa Sinar Rejeki Tahun 2024

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.895.295.618
1. Pendapatan Asli Desa = Rp. 9.560.750	
2. Dana Perimbangan = Rp. 1.885.734.868	
3. Lain-Lain Pendapatan yang Sah	
2. Belanja Desa	Rp. 1.091.985.753
1. Belanja Tidak Langsung = Rp. 58.395.000	
2. Belanja Langsung = Rp. 1.033.590.753	
3. Pembiayaan	Rp. 30.762.244
1. Penerimaan = Rp. 29.237.755	
2. Pengeluaran = Rp. 60.000.000	

Sumber: Sistem Informasi Desa

Alokasi dana tersebut diperuntukkan bagi pengembangan desa dengan detail penjelasan sebagai berikut: (a) Sekurang-kurangnya 30% dialokasikan bagi evolusi ekonomi masyarakat serta perbaikan taraf hidup warga; (b) Sekurang-kurangnya 30% diperuntukkan bagi pengelolaan urusan pemerintahan; dan (c) Sebanyak-banyaknya 40% dialokasikan Demi kemajuan infrastruktur.

Dana Desa Menurut Perspektif Islam

Islam menegaskan pentingnya studi perancangan yang mendetail dan sistematis, sebagaimana tercantum dalam Kitab Suci Al-Qur'an beserta sabda-sabda Nabi merupakan sumber utama petunjuk hidup dalam menghadapi berbagai permasalahan kehidupan. Salah satu manifestasi dari prinsip Tabligh adalah transparansi anggaran. Tabligh, yang berarti

²⁶ Pratiwi, D. N., & Muliarsi, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 158-162.

menyampaikan segala sesuatu secara terang dan tanpa disembunyikan, mencerminkan nilai kejujuran dalam berbagai aspek, termasuk dalam berbicara, niat dan tekad, perencanaan, pelaksanaan, tindakan, serta dalam merealisasikan prinsip-prinsip agama.

Dalam konteks pengelolaan anggaran, prinsip kejujuran hanya dapat dijalankan melalui keterbukaan dalam transparansi anggaran. Oleh karena itu, transparansi anggaran merupakan kewajiban. Dari perspektif hukum Islam, menolak transparansi anggaran dipandang sebagai bentuk perbuatan tercela yang dapat membatalkan pahala ibadah kepada Tuhan. Oleh karena itu, keterbukaan menjadi sarana yang krusial untuk melindungi dana publik dari praktik korupsi. Prinsip ini juga menuntut para pemegang kekuasaan untuk bersikap terbuka, Seperti yang termaktub dalam firman Allah pada Surah An-Nahl, ayat 10.:

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۙ ١٠١

“Dan apabila Kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". Bahkan kebanyakan mereka tiada mengetahui”. (Q.S. An-Nahl 16:101)

surah tersebut menjelaskan jika menggantikan ayat Al-Qur'an dengan ayat lain—di mana Allah, memiliki ilmu amat luas, banyak memahami segala sesuatu yang diturunkan-Nya, termasuk mengenai waktu, isi, serta hikmah di balik pergantian tersebut demi kemaslahatan umat—maka pada saat situasi ini berlangsung, sebagian orang yang tidak memiliki pengetahuan berbicara.

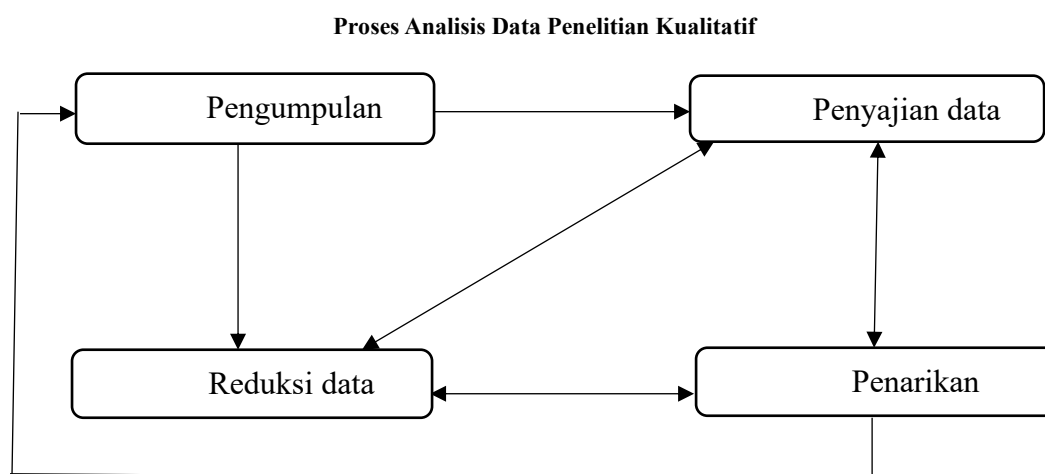
Pembahasan Temuan

Analisis Data Penelitian

Untuk mendiseminasikan hasil riset yang telah dilakukan, selain menyusunnya dalam bentuk karya akademik, peneliti juga dapat menulis artikel untuk dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Tentunya, peneliti perlu memilih jurnal yang sesuai, di mana editor serta pembacanya memiliki minat terhadap penelitian kualitatif serta data maupun temuan yang diperoleh melalui

metode wawancara.²⁷ Proses Evaluasi informasi dalam kajian kualitatif dimulai pra peneliti beraktivitas di lokasi, berlanjut berada di lokasi, dan terus berlanjut sesudah penelitian berakhir. Nasution (1998) menegaskan Analisis telah dimulai waktu tahap perumusan dan penjabaran issue, pra penelitian lokasi dimulai, dan terus menerus hingga penyusunan laporan temuan. Proses analisis informasi menjadi pedoman utama dalam penelitian berikutnya, bahkan hingga memungkinkan terbentuknya teori yang “grounded”. Kendati demikian, dalam Pendekatan yang bersifat kualitatif, di mana penekanan pada analisis data berlangsung seiring dengan aktivitas pengumpulan data di lapangan.²⁸

Gambar 2.



Sumber: Buku Metode Penelitian Miles dan Huberman

Tampilan dalam gambar tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara proses pengumpulan data dan analisis data, di mana pengumpulan data menjadi elemen esensial dalam analisis. Reduksi data dilakukan sebagai langkah untuk merangkum informasi, kemudian mengelompokkan data ke dalam unit konsep, kategori, serta tema tertentu.²⁹ Penelitian menunjukkan bahwa akses terhadap sumber daya keuangan sangat penting untuk mempromosikan investasi hijau dan menerapkan kinerja lingkungan (Hernandez 2016).³⁰

²⁷ Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.

²⁸ Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.

²⁹ Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.

³⁰ Rahman, Shahinur, 'What Drives Green Banking Operations in Bangladesh? Findings from PLS-SEM and BSEM', 2023

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan temuan serta analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban dalam tata kelola keuangan desa di Desa Sinar Rejeki memiliki peran yang sangat krusial untuk memperkuat keyakinan publik terhadap pemerintah dan pengelolaan sumber daya publik. Akuntabilitas yang tinggi menjamin penggunaan dana desa secara optimal dan hemat sumber daya, memenuhi sasaran dari konstruksi dan kebutuhan masyarakat. Penggunaan media sosial sebagai alat untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik terbukti efektif, memungkinkan masyarakat untuk Mengakses data yang transparan dan sesuai jadwal mengenai alokasi dana desa Melalui sistem tata kelola yang baik, yang dilandasi dengan partisipasi masyarakat dalam perencanaan melalui Musyawarah Desa, Pemerintah Desa berhasil membangun relasi yang lebih harmonis antara warga dan otoritas pemerintah, serta meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan.

Saran

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas Tata Kelola dan Sustainable Development Goals (SDGs) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sinar Rejeki:

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Untuk mengatasi tantangan dalam tata kelola dana desa, pemerintah desa perlu menyelenggarakan pelatihan dan workshop bagi pengurus desa dan penduduk desa. Pelatihan ini sebaiknya mencakup aspek manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, serta penggunaan media sosial sebagai sarana transparansi.

2. Pengembangan Sistem Informasi yang Terintegrasi

Membangun Jaringan pengelolaan data desa terintegrasi dalam pengelolaan informasi mengenai dana desa secara transparan. Ini akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi yang akurat dan tanggap terhadap laporan penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aassouli, Dalal, 'Can UGITs Promote Liquidity Management and Sustainable Development?', 10.2 (2018), 126–42
- Al Hazmi, R. A., A'yun, Q., Firdaus, I. N., Wardaningrum, L., Permana, A., Setiawan, A. G. D., ... & Rahmaningrum, W. R. A. (2024). Analisis faktor keberhasilan pengelola dana desa di Desa Cirumpak. *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(6), 1183-1194.
- Anisa, B. M. N., Noor, I., & Nugroho, G. W. (2024). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Jampangkulon. *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, 3(3), 1665-1687.
- Arianto, B. (2023). Tata Kelola Media Sosial Bagi Penguatan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Surianeun, Kabupaten Pandeglang. *Rahmatan Lil'Alamin Journal of Community Services*, 30-38.
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 334-344.
- Flynn, Maureen Alice, and Niamh M Brennan, 'Mapping Clinical Governance to Practitioner Roles and Responsibilities', 35.9 (2021), 18–33
- Humaida, N., Sa'adah, M. A., Huriyah, H., & Nida, N. H. (2020). Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan (sustainable development goals) dalam perspektif islam. *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora*, 18(1), 131-154.
- Jafar, H., Muda, I., Zainal, A., & Yasin, W. (2010). Profit maximization theory, survival-based theory and contingency theory: a review on several underlying research theories of corporate turnaround. *Jurnal Ekonom*, 13(4), 136-143.
- Jogiyanto Hartono, M. (Ed.). (2018). *Metoda pengumpulan dan teknik analisis data*. Penerbit Andi.
- Khalil, M. M. Z. F. (2021). Tata Kelola Pemerintahan dalam Perspektif Syariah Analisis Penerapan Syariat Islam, Aceh–Indonesia.
- Kohl, Katrin, Charles Hopkins, Matthias Barth, Gerd Michelsen, Leuphana Universität Lüneburg, Jana Dlouh, and others, 'A Whole-Institution Approach towards Sustainability: A Crucial Aspect of Higher Education's Individual and Collective Engagement with the SDGs and beyond', 2021

- Kumkit, Tidarat, Christopher Gan, and Baiding Hu, 'Members' Perspectives of Good Governance Practice of Thailand's Credit Union Cooperatives', 31.1 (2024), 55–73
- Liani, Y., & Takari, D. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(11), 4810-4825.
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, 7(1).
- Mais, R. G., Nuryati, T., Sakti, S. H., & Lestari, L. (2024). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 4(2), 140-158.
- Nasution, E. O. A. B., Nasution, L. P. L., Agustina, M., & Tambunan, K. (2023). Pertumbuhan Ekonomi Dalam Perspektif Islam. *Journal of Management and Creative Business*, 1(1), 63-71.
- Nawir, A., Syamsuddin, S., & Jusniaty, J. (2022). Penerapan Program Sustainable Development Goals (SDGs) Desa Polewali Dalam Mengurangi Kemiskinan. *Demokrasi*, 2(1), 1-18.
- Normasyhuri, K., Suryanto, T., & Prayoga, R. (2022). Dampak Dana Desa Terhadap Kemiskinan Dengan Pendekatan Indikator Sustainable Development Goals (SDGs): Tinjauan Ekonomi Islam. *RELASI: JURNAL EKONOMI*, 18(2), 173-185.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). Analisis data dan pengecekan keabsahan data.
- Permata, N. I., & Fauzan, A. (2023). ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA MASARAN BANYUATES TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Islamic Economics And Finance Journal*, 1(2), 90-100.
- Pratama, A. K., Badaruddin, B., & Kadir, A. (2021). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengawasan Dana Desa. *PERSPEKTIF*, 10(2), 371-382.
- Pratiwi, D. N., & Muliastari, D. (2020). Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa Guna Meningkatkan Akuntabilitas di Desa Mlandi Wonosobo. *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*, 6(2), 158-162.
- Rahman, Shahinur, 'What Drives Green Banking Operations in Bangladesh? Findings from PLS-SEM and BSEM', 2023

- Rejeb, Abderahman, and Karim Rejeb, 'Tracing Knowledge Di Ff Usion Fl Ows in Islamic Finance Research: A Main Path Analysis', 2024
- Rijali, A. (2018). Analisis data kualitatif. *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, 17(33), 81-95.
- Saregar, A., Hermanto, A., Qodir Zaelani, A., Iqbal Fasa, M., Mustofa, B., & Al Arif, Y. Panduan Penulisan Artikel Ilmiah Mahasiswa Tingkat Sarjana, UIN Raden Intan Lampung, (2023)
- Sulasih, L. I., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Analisis Kesadaran Industri Fashion dalam Upaya Meningkatkan Sustainable Development Goals (SDGs) melalui Produksi dan Konsumsi Sustainable Fashion Menurut Perspektif Ekonomi Islam. *Youth & Islamic Economic Journal*, 3(02), 1-18.
- Tasia, E., & Martiningsih, R. S. P. (2023). Implementasi Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals Desa (Studi Kasus: BUMDes Bahtera Mandiri Di Desa Jenggala, KLU). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 3(3), 105-117.
- Welan, V. P. R., Kawung, G. M., & Tumangkeng, S. Y. (2019). Peran dana desa dalam memberdayakan ekonomi masyarakat Desa Ranowangko Kecamatan Tombariri. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(04).
- Wibowo, M. I. S., & Hapsari, A. N. S. (2022). Pengelolaan keuangan BUMDes: upaya mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan desa. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 9(1), 52-71.
- Zainuddin, M. (2017). Pertumbuhan Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam. *Istithmar*, 1(2).